

**SAMSUNG DAN KEBIJAKAN PROTEKSIONISME KOREA SELATAN
TAHUN 2015-2025**

Oleh

MUHAMMAD HAFIZ HIDAYAT

2156071005



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

SAMSUNG DAN KEBIJAKAN PROTEKSIONISME KOREA SELATAN TAHUN 2015-2025

Oleh

MUHAMMAD HAFIZ HIDAYAT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan relasi Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan periode 2015–2025 dalam kerangka *developmental state* kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, buku, laporan internasional, dan dokumen kebijakan terkait industri semikonduktor Korea Selatan. Analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk memahami dinamika hubungan antara negara dan korporasi dalam konteks globalisasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk proteksionisme Korea Selatan mengalami transformasi dari proteksionisme konvensional menuju proteksionisme berbasis teknologi dan kapasitas industri. Negara tidak lagi mengandalkan tarif impor atau pembatasan perdagangan langsung, melainkan menggunakan instrumen seperti insentif pajak, subsidi *research and development (R&D)*, pembangunan infrastruktur semikonduktor, dan penguatan rantai pasok nasional melalui kebijakan *K-Semiconductor Strategy*. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan investasi, inovasi, dan daya saing global Samsung dalam industri semikonduktor.

Kata Kunci: Proteksionisme, Developmental State, Samsung, Korea Selatan, Semikonduktor.

ABSTRACT

SAMSUNG AND SOUTH KOREA’S PROTECTIONIST POLICIES (2015–2025)

By

MUHAMMAD HAFIZ HIDAYAT

This study aims to analyze Samsung’s role and relationship within South Korea’s protectionist policies during the 2015–2025 period from the perspective of the contemporary developmental state framework. The research employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of scholarly journals, books, international reports, and policy documents related to South Korea’s semiconductor industry. The data were analyzed thematically and interpretatively to understand the dynamics of state–corporate relations in the context of economic globalization. The findings reveal that South Korea’s protectionism has transformed from conventional protectionism into a form of protectionism based on technological advancement and industrial capacity development. Rather than relying on import tariffs or direct trade restrictions, the government has utilized policy instruments such as tax incentives, research and development (R&D) subsidies, semiconductor infrastructure development, and national supply chain strengthening through the K-Semiconductor Strategy. These policies have successfully enhanced Samsung’s investment capacity, innovation performance, and global competitiveness in the semiconductor industry.

Keywords: Protectionism, Developmental State, Samsung, South Korea, Semiconductor.

**SAMSUNG DAN KEBIJAKAN PROTEKSIONISME KOREA SELATAN
TAHUN 2015-2025**

Oleh

MUHAMMAD HAFIZ HIDAYAT

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **SAMSUNG DAN KEBIJAKAN
PROTEKSIONISME KOREA SELATAN
TAHUN 2015-2025**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Hafiz Hidayat**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2156071005

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Moh. Nizar, S. IP., M.A.
NIP 198308192015041005

Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP 199203092019032020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo H, S. A.N., M. PA.
NIP 198106282005011003

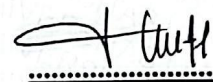
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

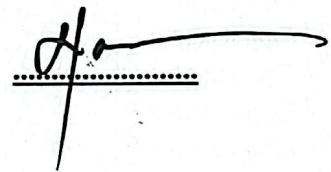
Ketua : Moh. Nizar, S. IP., M.A.



Sekretaris : Tety Rachmawati, S. IP., M.A.



Penguji : Hasbi Sidik, S. IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si.
NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2026



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 3 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hafiz Hidayat
NPM: 2156071005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada tanggal 10 Maret 2023, sebagai anak pertama dari Bapak Threes Arif Hidayat dan Ibu Desi Wahyuni. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Sandi Putra Bandar Lampung. Kemudian penulis melanjutkan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung selama enam tahun dan sekolah menengah pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung selama tiga tahun. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan formal ke jenjang sekolah menengah atas di SMA MAN 1 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa S-1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, misalnya dalam organisasi Japanila sebagai anggota. Selain itu, pada tahun 2023, penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama empat puluh hari di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai asisten Online Marketing.

MOTTO

There is no greater sorrow then to recall our times of joy in wretchedness.

— Inferno, Dante Alighieri

Do what you can, with what you have, where you are.

— Theodore Roosevelt

I am a slow walker, but I never walk back.

— Abraham Lincoln

Persembahan

Untuk Seluruh Pembaca

Sanwacana

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat anugerah, rahmat, dan juga ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul “Samsung dan Kebijakan Proteksionisme Korea Selatan Tahun 2015-2025” ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam proses penulisannya, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan serta arahan, dan motivasi yang tak henti-hentinya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung. S.A.N., M.P.A., selaku Kepala Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mba Moh Nizar, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang senantiasa memberikan masukan, nasihat, serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi;
4. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi;
5. Mas Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi yang senantiasa memberikan saran, masukan, dan ide yang membangun terkait pengerjaan penelitian skripsi;
6. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu selama masa perkuliahan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional, yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, dan dedikasi, sehingga penulis dapat mengasah cara berpikir kritis serta melatih kesabaran sebagai pembentukan karakter penulis selama masa perkuliahan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
8. Keluarga Penulis; Papa, Mama, Adek, dan Keluarga Besar Prof.Dr. Damrah Khair, M.A yang selalu memberikan doa, dukungan, serta bantuan pada setiap perjalanan penulis dalam meraih gelar sarjana di Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;

9. Junior dan Teman Penulis: Daffa, Rahel serta seluruh teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2021 yang senantiasa menemani, menghibur, dan menyemangati penulis;
10. Terakhir, diriku sendiri. Semoga di tahun mendatang, dapat terus berjuang dan melewati tantangan yang dihadapi.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

P

e

]

]

]

]

!

!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bung', with a long horizontal flourish extending to the right.

Muhammad Hafiz Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Konseptual.....	12
2.2.1 Konsep Proteksionisme	12
2.2.2 <i>Developmental State</i>	17
2.3 Desain Penelitian.....	23
III. METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tipe Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.6 Indikator Analisis	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Profil Samsung	34

4.2	Bentuk Proteksionisme Korea Selatan Terhadap Samsung	40
4.3	Relasi Samsung dalam Kebijakan Proteksionisme Korea Selatan.....	45
4.4	Analisis	52
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Desain Penelitian.....	23
2.	Revenue Samsung 2016-2025.....	25
3.	Samsung tahun 2024 Pimpin Pangsa Pasar Global Memori	36
4.	Rantai Pasok Global Industri Semikonduktor	46
5.	Rantai Nilai Industri Semikonduktor	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komparasi Penelitian Terdahulu: Samsung dan Hubungan Negara-Bisnis di Korea Selatan	10
2. Perkembangan Revenue Samsung Electronics per Dekade	35
3. Pangsa Pasar Global Semikonduktor (Memori)	36
4. Kontribusi Ekspor Samsung terhadap Total Ekspor Korea Selatan	37
5. Kebijakan Proteksionisme Semikonduktor Korea Selatan (2015–2025)	40
6. Pangsa Pasar Global Semikonduktor Samsung	41
7. Data Empirik Keterlibatan Samsung (2015–2025)	41
8. Kebijakan Proteksionisme Semikonduktor Korea Selatan (2015–2025)	47
9. Pangsa Pasar Global Semikonduktor Samsung	49

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
AI	: Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
AS	: Amerika Serikat
COVID-19	: Coronavirus Disease 2019
DRAM	: Dynamic Random Access Memory
EPB	: Economic Planning Board
JSTOR	: Journal Storage
K-Industry 4.0	: Korea Industry 4.0 Initiative
KRW	: Korean Won
LG	: Lucky Goldstar
MITI	: Ministry of International Trade and Industry
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
R&D	: Research and Development
Scopus	: Scientific Citation Index Database
SK Hynix	: South Korea Hynix Semiconductor
USD	: United States Dollar
WTO	: World Trade Organization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global pasca Perang Dunia II menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, khususnya di kawasan Asia Timur. Berbeda dengan pendekatan ekonomi liberal yang menekankan mekanisme pasar sebagai penggerak utama pembangunan, sejumlah negara berhasil mencapai industrialisasi secara cepat melalui intervensi negara yang terarah dan sistematis. Korea Selatan merupakan salah satu contoh paling menonjol dalam konteks tersebut, di mana negara secara aktif merancang dan mengimplementasikan kebijakan industri untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional (Johnson, 1982). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa peran negara tetap menjadi faktor krusial dalam proses pembangunan ekonomi modern, bahkan dalam konteks globalisasi (Woo-Cumings, 1999).

Model pembangunan yang diterapkan Korea Selatan kemudian dikenal sebagai *developmental state*, yaitu suatu model di mana negara memiliki kapasitas institusional yang kuat dan birokrasi yang efektif dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Dalam model ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai perencana strategis yang menentukan arah dan prioritas pembangunan industri (Evans, 1995). Kapasitas birokrasi yang profesional serta otonomi relatif dari tekanan kepentingan sempit menjadi salah satu faktor

utama keberhasilan model ini (Johnson, 1982). Oleh karena itu, *developmental state* sering dipandang sebagai alternatif terhadap pendekatan ekonomi neoliberal yang lebih mengandalkan mekanisme pasar.

Salah satu karakteristik utama dari *developmental state* adalah penggunaan kebijakan industri sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara secara aktif menentukan sektor-sektor prioritas yang dianggap strategis bagi pembangunan jangka panjang. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk intervensi, seperti subsidi, kredit bunga rendah, serta perlindungan terhadap industri domestik (Chang, 2002b). Dalam konteks ini, negara tidak bersifat pasif, melainkan berperan sebagai aktor utama yang mengoordinasikan aktivitas ekonomi secara terarah.

Proteksionisme menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pembangunan negara-negara *developmental state*. Dalam kerangka ini, proteksionisme tidak dipahami sebagai kebijakan isolasionis yang menutup diri dari pasar global, melainkan sebagai strategi selektif dan temporer untuk melindungi industri domestik yang masih dalam tahap perkembangan (Rodrik, 2011). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi industri domestik agar dapat tumbuh, meningkatkan kapasitas produksi, serta membangun daya saing di pasar internasional. Dengan demikian, proteksionisme merupakan bagian integral dari strategi pembangunan yang bersifat pragmatis dan kontekstual.

Keberhasilan Korea Selatan dalam mengimplementasikan model ini tidak terlepas dari hubungan erat antara negara dan sektor swasta, khususnya kelompok konglomerasi besar yang dikenal sebagai *chaebol*. *Chaebol* berkembang sebagai mitra strategis negara dalam menjalankan agenda industrialisasi nasional. Negara memberikan berbagai bentuk dukungan kebijakan, sementara perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, ekspor, serta inovasi teknologi (Amsden, 1989). Relasi ini

menunjukkan adanya koordinasi yang erat antara kepentingan negara dan kepentingan korporasi dalam kerangka pembangunan nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, hubungan antara negara dan korporasi dalam model *developmental state* sering dijelaskan melalui konsep *embedded autonomy*. Konsep ini menekankan bahwa negara memiliki otonomi dalam merumuskan kebijakan, tetapi tetap terhubung secara erat dengan sektor swasta (Evans, 1995). Hubungan ini memungkinkan terciptanya koordinasi yang efektif antara kebijakan negara dan kebutuhan industri. Namun demikian, kedekatan hubungan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketergantungan negara terhadap korporasi besar, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas negara dalam mempertahankan otonomi kebijakan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, model *developmental state* mengalami berbagai perubahan dan adaptasi. Tekanan liberalisasi ekonomi, integrasi pasar global, serta perkembangan teknologi mendorong negara untuk menyesuaikan strategi pembangunan mereka. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa negara seperti Korea Selatan tetap mempertahankan peran strategisnya dalam sektor-sektor tertentu, khususnya sektor industri berteknologi tinggi (Kim, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa *developmental state* tidak mengalami kemunduran, melainkan mengalami transformasi dalam menghadapi dinamika global.

Dalam konteks kontemporer, kebijakan proteksionisme tetap menjadi instrumen penting dalam strategi pembangunan ekonomi Korea Selatan. Negara masih menggunakan berbagai kebijakan untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan industri domestik, seperti subsidi, insentif fiskal, serta dukungan terhadap penelitian dan pengembangan teknologi (Chang, 2002b). Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tetap berperan aktif dalam

mengarahkan pembangunan ekonomi, meskipun berada dalam tekanan globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Sektor teknologi tinggi, khususnya semikonduktor dan elektronik, menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan Korea Selatan. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional dan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor ini juga memiliki nilai tambah yang tinggi serta berperan penting dalam mendorong inovasi teknologi (J.-H. Kim et al., 2023). Data OECD menunjukkan bahwa produk komputer, elektronik, dan optik menyumbang sekitar 24% dari total ekspor Korea Selatan, jauh di atas rata-rata negara OECD yang hanya sebesar 8,1% (OECD, 2023). Sementara itu, ekspor semikonduktor menyumbang sekitar 20,1% dari total ekspor nasional Korea Selatan pada tahun 2021 (OECD, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor teknologi tinggi telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional Korea Selatan. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor ini melalui investasi riset dan pengembangan (*research and development*), insentif fiskal, serta strategi industrialisasi jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis teknologi.

Dalam sektor tersebut, perusahaan-perusahaan besar memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan daya saing nasional. Perusahaan seperti Samsung tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor strategis yang berkontribusi dalam inovasi teknologi, ekspansi global, serta penguatan rantai pasok industri (K. Lee, 2023). Secara empiris, Korea Selatan menguasai sekitar 60,5% pasar global memori semikonduktor pada tahun 2023, sedangkan Samsung Electronics sendiri menguasai sekitar 45,5% pangsa pasar global DRAM pada kuartal IV tahun 2023 (WiFiTalents, 2026). Dominasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan industri teknologi Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas inovasi dan investasi perusahaan-perusahaan besar, khususnya dalam sektor semikonduktor dan

elektronik. Dalam konteks ini, posisi korporasi besar menjadi semakin penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi nasional dan daya saing industri Korea Selatan di tingkat global.

Samsung merupakan salah satu *chaebol* terbesar di Korea Selatan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor strategis, termasuk semikonduktor, elektronik, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Dalam beberapa dekade terakhir, Samsung telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi global yang memiliki pengaruh besar dalam industri internasional (Kim, 2019). Pada tahun 2024, sektor semikonduktor Samsung menyumbang sekitar 44% dari total pendapatan perusahaan, sementara investasi modal perusahaan di sektor semikonduktor mencapai sekitar KRW 64,8 triliun atau setara dengan USD 47 miliar (WiFiTalents, 2026). Selain itu, Reuters melaporkan bahwa ekspor semikonduktor Korea Selatan mencapai sekitar 37% dari total ekspor nasional pada April 2026, yang menunjukkan besarnya ketergantungan ekonomi nasional terhadap industri teknologi tinggi (Reuters, 2026). Posisi ini menjadikan Samsung sebagai aktor ekonomi yang sangat penting dalam struktur ekonomi Korea Selatan serta memperlihatkan keterkaitan erat antara kekuatan *chaebol* dan strategi pembangunan nasional berbasis teknologi.

Kontribusi Samsung terhadap perekonomian Korea Selatan dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti kontribusi terhadap ekspor nasional, investasi, serta penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Samsung juga berperan penting dalam pengembangan inovasi melalui investasi besar dalam penelitian dan pengembangan (OECD, 2022a). Namun demikian, dominasi Samsung dalam perekonomian nasional juga menimbulkan potensi ketergantungan negara terhadap korporasi besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara mampu mempertahankan otonomi kebijakan dalam menghadapi kekuatan ekonomi korporasi.

Pemilihan Samsung sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan ini memiliki posisi strategis dalam sektor industri yang menjadi prioritas kebijakan negara. Selain itu, Samsung memiliki hubungan historis yang erat dengan pemerintah Korea Selatan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Posisi Samsung dalam pasar global juga menjadikannya relevan untuk dianalisis dalam perspektif ekonomi politik internasional (K. Lee, 2023). Dengan demikian, Samsung merupakan kasus yang representatif untuk memahami dinamika hubungan antara negara dan korporasi.

Pada periode 2015–2025, dinamika ekonomi global mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi kebijakan ekonomi berbagai negara. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, disrupsi rantai pasok global, serta pandemi COVID-19 menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang tinggi (OECD, 2022a). Dalam kondisi tersebut, negara dituntut untuk mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif dan protektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Korea Selatan terus menyesuaikan kebijakan industrinya dengan menggunakan proteksionisme secara selektif untuk melindungi sektor-sektor strategis. Selain itu, negara juga meningkatkan dukungan terhadap inovasi dan pengembangan teknologi untuk menjaga daya saing global (Rodrik, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme tetap menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi Korea Selatan di era kontemporer.

Meskipun hubungan antara negara dan *chaebol* telah banyak dikaji dalam literatur akademik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada periode awal industrialisasi Korea Selatan dan cenderung menempatkan korporasi sebagai objek kebijakan negara (Amsden, 1989). Kajian tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika hubungan negara–korporasi dalam

konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Padahal, dalam konteks kontemporer, korporasi besar memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan ekonomi.

Selain itu, kajian yang secara spesifik menganalisis peran perusahaan teknologi besar seperti Samsung dalam kebijakan proteksionisme masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada kebijakan negara secara makro tanpa mengkaji interaksi langsung antara negara dan korporasi dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam literatur yang ada, khususnya dalam memahami posisi korporasi dalam kebijakan ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum terjelaskannya secara komprehensif bagaimana perusahaan besar seperti Samsung tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan proteksionisme negara. Dalam penelitian ini, keterlibatan Samsung dipahami sebagai bentuk interaksi aktif antara korporasi dan negara, baik dalam merespons, menyesuaikan diri, maupun berpotensi memengaruhi kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam memahami transformasi hubungan antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state* kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025?
2. Bagaimana relasi Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bentuk dan relasi keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025 dalam kerangka *developmental state*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang ekonomi politik internasional. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai *developmental state*, hubungan antara negara dan korporasi (*state–business relations*), serta kebijakan proteksionisme dalam konteks ekonomi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru dengan menempatkan korporasi besar sebagai aktor yang tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki potensi untuk memengaruhi arah kebijakan negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian untuk memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan serta mengidentifikasi posisi penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat memetakan berbagai pendekatan, temuan, serta perspektif yang digunakan dalam menganalisis hubungan antara negara dan korporasi dalam konteks pembangunan ekonomi. Selain itu, kajian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik, khususnya terkait dengan keterlibatan korporasi besar dalam kebijakan ekonomi negara.

Dalam konteks Korea Selatan, berbagai penelitian telah mengkaji peran *chaebol* dalam pembangunan ekonomi, baik dari perspektif kebijakan industri, ekonomi politik, maupun tata kelola korporasi. Namun, pendekatan yang digunakan dalam literatur tersebut cenderung beragam dan belum secara spesifik mengkaji satu korporasi tertentu dalam kaitannya dengan kebijakan proteksionisme negara pada periode kontemporer. Oleh karena itu, pemetaan penelitian terdahulu menjadi penting untuk melihat posisi penelitian ini dalam khazanah akademik yang telah ada. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1 Komparasi Penelitian Terdahulu: Samsung dan Hubungan Negara-Bisnis di Korea Selatan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Teori / Konsep Utama	Metode	Fokus Kajian	Temuan Kunci	Relevansi dengan Penelitian
1	Lim (2012)	The Chaebol and Industrial Policy in Korea	Hubungan negara-bisnis, kebijakan industri	Studi historis	Peran negara dalam industrialisasi	Kebijakan industri menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan chaebol	Memberikan konteks struktural kebijakan industri Korea Selatan
2	Lim (2013)	Industrial Policy and Chaebol	Kebijakan industri vertikal dan horizontal	Analisis kebijakan	Evolusi kebijakan industri	Perubahan kebijakan tidak sepenuhnya menggeser posisi chaebol	Dasar analisis kesinambungan kebijakan industri
3	Westphal (1990)	Industrial Policy in an Export-Propelled Economy	Industrialisasi berbasis ekspor	Analisis ekonomi politik	Peran ekspor dalam pembangunan	Negara memfasilitasi pertumbuhan perusahaan besar	Memperkuat kerangka developmental state
4	Yi & Jung (2007)	Korean Competition Law, Policy, and Economics	Struktur kepemilikan silang, hukum persaingan	Analisis hukum-ekonomi	Regulasi dan struktur pasar	Kepemilikan silang memperkuat kontrol internal chaebol	Relevan untuk analisis aspek hukum persaingan
5	Saadah (2017)	The Impact of Samsung Scandal in South Korean Corporate Culture	Budaya korporasi, Konfusianisme	Analisis deskriptif	Tata kelola perusahaan	Budaya hierarkis memengaruhi pengambilan keputusan	Dasar analisis budaya korporasi Samsung
6	You (2021)	The Politics of Reform and Capture in South Korea	Reformasi ekonomi, relasi negara-bisnis	Studi historis	Reformasi pasca krisis	Reformasi menghadapi tantangan struktural	Menjelaskan dinamika kebijakan kontemporer
7	Kang & Jo (2021)	State-Business Relations in Green Industrial Policy	Kekuatan struktural bisnis	Analisis kebijakan	Kebijakan industri hijau	Perusahaan besar berperan dalam implementasi kebijakan	Relevan dengan kebijakan industri mutakhir
8	Toro Sima (2021)	Chaebol Companies as the Backbone of South Korea's Economy	Peran ekonomi chaebol	Analisis historis	Stabilitas ekonomi nasional	Chaebol berkontribusi signifikan pada pertumbuhan	Memberi perspektif makroekonomi
9	Gjoni (2022)	The Impact of Chaebol	Pertumbuhan ekonomi dan	Analisis data	Dampak ekonomi	Ketergantungan pada	Menguatkan urgensi

on the South Korean Economy	tenaga kerja	ekonomi	chaebol	perusahaan besar	keseimbangan kebijakan
--------------------------------------	--------------	---------	---------	---------------------	---------------------------

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai *developmental state*, kebijakan industri, dan peran *chaebol* di Korea Selatan telah berkembang secara luas, baik dari perspektif historis, struktural, maupun ekonomi-politik. Penelitian seperti Lim (2012, 2013), Amsden (1989), dan Westphal (1990) menekankan peran negara dalam membangun dan melindungi industri nasional melalui kebijakan industrialisasi yang terarah. Sementara itu, kajian Yi dan Jung (2007), Saadah (2017), serta You (2021) lebih menyoroti aspek hukum, tata kelola perusahaan, serta dinamika relasi kekuasaan dalam struktur *chaebol*.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memposisikan *chaebol* sebagai entitas kolektif dan cenderung dianalisis dalam kerangka makro atau agregat. Hal ini menyebabkan terbatasnya kajian yang secara spesifik menempatkan satu korporasi tertentu, seperti Samsung, sebagai fokus analisis dalam hubungan dengan kebijakan negara. Padahal, dalam konteks ekonomi kontemporer, perusahaan besar tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang memiliki kapasitas untuk merespons dan berinteraksi dengan kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, dalam banyak kajian, kebijakan proteksionisme lebih sering diperlakukan sebagai konteks atau latar kebijakan, bukan sebagai fokus utama analisis yang dikaitkan secara langsung dengan peran korporasi besar. Padahal, proteksionisme merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi *developmental state*, khususnya dalam melindungi dan memperkuat industri domestik. Oleh karena itu, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara eksplisit menghubungkan kebijakan proteksionisme dengan keterlibatan korporasi besar dalam proses kebijakan.

Kesenjangan penelitian ini menjadi semakin relevan dalam periode 2015–2025, yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, disrupsi rantai pasok, serta dinamika geopolitik dan teknologi yang memengaruhi arah kebijakan industri Korea Selatan (Rodrik, 2011; OECD, 2021). Meskipun penelitian mutakhir seperti Kang dan Jo (2021) serta Gjoni (2022) telah mulai membahas relasi negara–bisnis dalam konteks kebijakan industri kontemporer, analisis yang dilakukan masih berada pada tingkat sektoral atau agregat *chaebol*, dan belum secara spesifik menempatkan Samsung sebagai aktor dalam kebijakan proteksionisme negara.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan analitis dalam literatur yang belum secara komprehensif menjelaskan bagaimana keterlibatan perusahaan besar seperti Samsung dalam kebijakan proteksionisme, khususnya dalam periode kontemporer. Kesenjangan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) terbatasnya kajian yang berfokus pada satu korporasi secara spesifik; (2) belum terintegrasinya analisis antara kebijakan proteksionisme dan peran korporasi; serta (3) kurangnya kajian yang melihat korporasi sebagai aktor dalam dinamika kebijakan dalam kerangka *developmental state*.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025, serta memahami bagaimana keterlibatan tersebut mencerminkan relasi antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi politik internasional, khususnya terkait transformasi hubungan negara–korporasi dalam konteks kebijakan industri kontemporer.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep Proteksionisme

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan melindungi industri domestik dari tekanan kompetisi global melalui penerapan berbagai instrumen, seperti tarif impor, kuota, subsidi, hingga hambatan non-tarif. Secara umum, kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat sektor strategis, serta memastikan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Rodrik (2011) menjelaskan bahwa proteksionisme sering kali digunakan oleh negara untuk menciptakan *level playing field* yang adil di tengah sistem perdagangan internasional yang asimetris. Dalam konteks Korea Selatan, proteksionisme telah lama menjadi bagian dari strategi industrialisasi yang dikembangkan secara terarah sejak 1960-an di bawah model *developmental state*, dan terus bertransformasi dalam dua dekade terakhir mengikuti dinamika globalisasi serta persaingan teknologi.

Pada dasarnya, proteksionisme dapat bersifat defensif maupun ofensif. Bersifat defensif ketika digunakan untuk melindungi industri domestik dari dampak negatif globalisasi, dan bersifat ofensif ketika menjadi instrumen pembangunan nasional jangka panjang untuk menciptakan industri unggulan. Dalam kasus Korea Selatan, pendekatan yang digunakan lebih cenderung bersifat strategis dan ofensif. Pemerintah tidak semata-mata menutup diri dari perdagangan global, tetapi justru menggunakan proteksionisme untuk memfasilitasi proses *catch-up industrialization*, yaitu strategi mengejar ketertinggalan teknologi dari negara maju (Kim, 2019). Melalui kombinasi antara kebijakan industri, proteksi selektif, dan dukungan riset, Korea Selatan berhasil menumbuhkan konglomerat raksasa seperti Samsung yang kini menjadi aktor dominan dalam ekonomi global.

Secara teoritis, proteksionisme memiliki dasar yang kuat dalam literatur ekonomi pembangunan. Breslin (2011) melalui konsep *infant industry*

argument menekankan pentingnya perlindungan sementara bagi industri yang masih baru agar dapat tumbuh sebelum bersaing di pasar internasional. Sementara Brander dan Spencer (1985) melalui *strategic trade theory* menunjukkan bahwa intervensi negara dapat menciptakan keunggulan kompetitif pada industri dengan struktur pasar oligopolistik, seperti industri semikonduktor atau elektronik. Kedua teori ini menjadi fondasi konseptual bagi kebijakan industri Korea Selatan, yang memadukan proteksi, subsidi riset, serta dukungan ekspor. Park (2011) menambahkan bahwa kesuksesan industri Korea Selatan, termasuk Samsung, sangat dipengaruhi oleh *path dependency*, yaitu keberlanjutan kebijakan proteksionis dan industrial yang dimulai sejak masa pembangunan awal dan terus diadaptasi secara evolutif.

Pada dekade 2015–2025, kebijakan proteksionisme Korea Selatan mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Jika pada masa lalu proteksi dilakukan melalui tarif dan pembatasan impor, maka sejak 2015 proteksionisme lebih banyak berwujud kebijakan strategis yang menyamarkan diri di balik jargon inovasi dan keamanan ekonomi. Baldwin dan Evenett (2020) menyebut fenomena ini sebagai *neo-protectionism*, yaitu bentuk proteksionisme baru yang lebih tersembunyi di balik kebijakan industri, subsidi riset, nasionalisme digital, dan kontrol data. Dalam konteks ini, pemerintah Korea Selatan memperkuat intervensi terhadap sektor teknologi tinggi, terutama semikonduktor, untuk menghadapi ketegangan geopolitik global antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berpengaruh langsung pada rantai pasok chip dunia.

Melalui kebijakan *K-Semiconductor Strategy* yang diluncurkan pada 2019, pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai insentif kepada perusahaan domestik seperti Samsung dan SK Hynix. Kebijakan ini mencakup pemberian subsidi hingga 20% untuk investasi riset dan pengembangan semikonduktor, insentif pajak bagi ekspor produk

teknologi, serta pembangunan *K-Semiconductor Belt* di wilayah Gyeonggi, Suwon, dan Pyeongtaek. Inisiatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap industri strategis, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya persaingan teknologi global. Dengan kata lain, proteksionisme Korea Selatan di era 2015–2025 bukanlah bentuk isolasi ekonomi, melainkan strategi negara untuk memperkuat daya saing industri dalam konteks *technonationalism*—nasionalisme berbasis teknologi (K. Lee, 2023).

Dalam konteks perusahaan, Samsung menjadi contoh konkret dari keberhasilan implementasi kebijakan proteksionisme strategis tersebut. Sebagai perusahaan yang lahir dari dukungan negara sejak awal industrialisasi Korea, Samsung tetap mendapatkan prioritas dalam kebijakan ekonomi nasional hingga kini. McGee dan Yoon (1996) menggambarkan hubungan antara negara dan chaebol seperti Samsung sebagai bentuk *developmental corporatism*, di mana kolaborasi antara pemerintah dan korporasi besar berfungsi untuk mempercepat industrialisasi. Melalui kebijakan fiskal, perlindungan pasar domestik, serta investasi negara dalam infrastruktur teknologi, Samsung mampu memperluas kapasitas produksi pasar global semikonduktor. Data dari Korea International Trade Association (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ekspor semikonduktor menyumbang lebih dari 20% dari total ekspor Korea Selatan, dan lebih dari separuh nilai ekspor tersebut berasal dari Samsung Electronics.

Namun, meskipun keberhasilan tersebut tidak dapat dipungkiri, kebijakan proteksionisme juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Bhagwati (1988) menegaskan bahwa proteksionisme yang berlangsung terlalu lama dapat menimbulkan distorsi harga, menurunkan efisiensi, serta menghambat inovasi jangka panjang. Altman (2000) memperingatkan bahwa ketergantungan terhadap dukungan negara

dapat menciptakan *moral hazard* dan memicu “dependensi struktural,” di mana perusahaan besar tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi secara mandiri. Kritik menilai bahwa chaebol seperti Samsung telah menciptakan ketimpangan ekonomi antara sektor besar dan usaha kecil-menengah di Korea Selatan. Oleh karena itu, banyak ekonom berpendapat bahwa proteksi terhadap perusahaan besar harus bersifat temporer dan disertai dengan kebijakan pemerataan serta penguatan ekosistem inovasi secara menyeluruh.

Meskipun demikian, kebijakan proteksionisme tetap relevan sebagai alat strategi pembangunan adaptif, terutama dalam menghadapi gangguan rantai pasok global dan krisis ekonomi dunia. Krisis finansial 2008, perang dagang AS–Tiongkok, serta pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya ketahanan industri domestik. Pemerintah Korea Selatan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat otonomi industri melalui kebijakan nasional yang mendukung *reshoring*, penguasaan teknologi inti, dan diversifikasi pasar ekspor (OECD, 2022a). Dalam konteks ini, proteksionisme berfungsi bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi keamanan nasional dan kedaulatan teknologi.

Dengan demikian, proteksionisme di Korea Selatan selama periode 2015–2025 dapat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat adaptif dan selektif. Ia tidak lagi sekadar bertujuan melindungi industri domestik dari kompetisi asing, melainkan menjadi alat strategis untuk memperkuat posisi Korea Selatan dalam rantai nilai global. Samsung, sebagai simbol keberhasilan industrialisasi Korea, merupakan representasi nyata dari keberhasilan sinergi antara kebijakan negara dan strategi korporasi. Kombinasi antara perlindungan selektif, investasi riset yang agresif, serta kemampuan inovatif menjadikan Samsung bukan hanya penerima manfaat kebijakan proteksionis, tetapi juga pilar

utama dalam keberlanjutan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kebijakan proteksionisme Korea Selatan bukanlah bentuk anti-globalisasi, melainkan strategi *smart protectionism* yang menempatkan perlindungan sebagai sarana untuk mencapai daya saing global yang berkelanjutan.

2.2.2 *Developmental State*

Developmental state atau negara pembangunan merupakan konsep yang merujuk pada model negara yang memiliki kapasitas kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi melalui intervensi aktif terhadap pasar dan proses industrialisasi. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga bertindak sebagai aktor utama yang merancang strategi pembangunan, menentukan sektor prioritas, memberikan perlindungan industri domestik, serta mengoordinasikan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Johnson, 1982). Menurut Chalmers Johnson, developmental state ditandai oleh keberadaan birokrasi yang efektif, otonom, dan berorientasi pada pembangunan, terutama dalam mengelola kebijakan industri dan mendorong transformasi struktural ekonomi nasional.

Konsep developmental state muncul sebagai respons terhadap kegagalan teori ekonomi liberal dan perencanaan sentral dalam menjelaskan keberhasilan industrialisasi cepat di Asia Timur pasca-Perang Dunia II. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi bukan semata hasil mekanisme pasar bebas, melainkan akibat dari peran aktif dan terencana negara dalam mengarahkan industrialisasi. Dalam model ini, negara pembangunan tidak hanya hadir sebagai pengatur ekonomi, tetapi juga sebagai entrepreneurial state, yaitu negara yang berani mengambil

risiko, menginvestasikan sumber daya, dan membangun koordinasi strategis antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan daya saing struktural di pasar global (Johnson, 1982). Dengan demikian, *developmental state* menempatkan negara sebagai motor utama transformasi ekonomi melalui kebijakan industri, investasi teknologi, serta perlindungan terhadap sektor-sektor strategis nasional.

Konsep *developmental state* juga menekankan pentingnya hubungan erat antara negara dan korporasi domestik dalam mendorong industrialisasi nasional. Negara memberikan dukungan berupa subsidi, perlindungan pasar, akses pembiayaan, serta kebijakan ekspor kepada perusahaan-perusahaan nasional yang dianggap strategis. Sebagai imbalannya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitas, ekspor, dan daya saing internasional. Pola hubungan semacam ini terlihat jelas di Korea Selatan melalui dukungan negara terhadap kelompok usaha besar atau *chaebol* seperti Samsung, Hyundai, dan LG yang kemudian berkembang menjadi perusahaan global (Amsden, 1989). Oleh karena itu, *developmental state* dipahami sebagai model pembangunan yang mengombinasikan kapasitas negara yang kuat dengan orientasi industrialisasi dan ekspor untuk mempercepat modernisasi ekonomi nasional.

Korea Selatan sering dianggap sebagai model klasik dari *developmental state* yang berhasil menggabungkan kapasitas birokrasi yang kuat, kebijakan industri terarah, dan hubungan simbiotik antara negara dan sektor swasta. Sejak masa pemerintahan Park Chung-hee pada 1960-an, pemerintah Korea membangun sistem industrialisasi berbasis ekspor melalui proteksi selektif dan dukungan terhadap konglomerat domestik atau *chaebol* seperti Samsung, Hyundai, dan LG (Amsden, 1989). Negara memainkan peran dominan dalam menentukan sektor strategis, mengalokasikan kredit murah melalui bank pembangunan, serta

melindungi pasar domestik hingga industri nasional mencapai daya saing global. Model ini terbukti berhasil mengubah Korea Selatan dari negara agraris miskin menjadi salah satu ekonomi teknologi paling maju di dunia.

Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Peran *chaebol* menciptakan ketergantungan yang tinggi antara negara dan korporasi besar, sehingga hubungan yang seharusnya bersifat *embedded*—tertanam secara produktif—sering kali bergeser menjadi *captured*, di mana kepentingan politik dan bisnis saling bertaut secara berlebihan (Evans, 1995). Struktur *developmental state* Korea, terutama setelah krisis finansial Asia 1997, mulai menunjukkan dilema tata kelola: di satu sisi negara ingin mempertahankan kontrol terhadap arah ekonomi nasional, namun di sisi lain, liberalisasi global menuntut keterbukaan dan kompetisi. Hal ini menempatkan negara dalam posisi kompleks antara peran pengarah ekonomi dan fasilitator inovasi pasar.

Gagasan *developmental state* pertama kali diperkenalkan oleh Chalmers Johnson (1982) melalui studi tentang Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang (MITI). Johnson menekankan pentingnya keberadaan birokrasi meritokratik, efisien, dan otonom dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang. Model Jepang ini kemudian menjadi inspirasi bagi Korea Selatan dalam merancang lembaga seperti *Economic Planning Board (EPB)* yang memainkan peran sentral dalam sinkronisasi kebijakan fiskal, industri, dan perdagangan. Amsden (1989) memperluas analisis tersebut melalui karyanya *Asia's Next Giant*, yang menjelaskan bahwa industrialisasi Korea Selatan berhasil karena adanya kebijakan industri yang ditargetkan, sistem insentif berbasis kinerja, dan kedisiplinan korporasi dalam memenuhi standar ekspor yang ditetapkan

negara. Sementara itu, Wade (1990) menyoroti bahwa keberhasilan Korea juga ditentukan oleh kombinasi antara proteksionisme selektif dan promosi ekspor—strategi yang menyeimbangkan antara proteksi domestik dan integrasi global.

Evans (1995) kemudian memperkenalkan konsep *embedded autonomy* untuk menjelaskan keseimbangan antara otonomi negara dan keterkaitan produktif dengan sektor swasta. Dalam konteks Korea Selatan, hubungan antara pemerintah dan *chaebol* seperti Samsung menunjukkan bentuk khas dari *embedded autonomy* di mana negara tetap memiliki kekuasaan perencanaan ekonomi, tetapi juga bergantung pada kolaborasi dengan aktor industri besar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi ini terus berlanjut hingga dekade 2015–2025, dengan bentuk baru berupa kemitraan negara–korporasi dalam sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan energi hijau.

Transformasi model *developmental state* Korea Selatan pada era digital ditandai dengan munculnya *technological developmentalism*—fase baru di mana negara fokus pada penguasaan teknologi strategis dan inovasi domestik untuk mempertahankan daya saing global (K. Lee, 2023). Dalam periode 2015–2025, pemerintah Korea Selatan meluncurkan serangkaian kebijakan seperti *K-Semiconductor Strategy* (2019), *Digital New Deal* (2020), dan *K-Industry 4.0 Initiative*, yang secara langsung memperkuat sektor teknologi nasional. Samsung, sebagai perusahaan unggulan negara, memperoleh berbagai dukungan fiskal, insentif R&D, dan perlindungan regulatif dalam upaya mempertahankan peran globalnya di pasar semikonduktor. Dengan demikian, karakter *developmental state* tidak hilang dalam era neoliberal, melainkan berevolusi menjadi *innovation-driven developmentalism*—bentuk baru

di mana intervensi negara dilakukan melalui kebijakan inovasi, penguatan riset, dan kedaulatan teknologi (OECD, 2022a).

Meskipun demikian, berbagai kritik juga diarahkan terhadap model *developmental state*. Leftwich (1995) menyoroti kesulitan replikasi model ini di luar Asia Timur karena prasyarat institusional yang spesifik, seperti birokrasi profesional, kepemimpinan politik yang stabil, dan konsensus pembangunan nasional. Di banyak negara berkembang, upaya meniru model Korea Selatan justru berujung pada *state capture* dan korupsi, karena absennya sistem meritokrasi dan akuntabilitas publik. Kritik lain datang dari perspektif feminis dan ekologis yang menilai bahwa *developmental state* terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sering kali mengabaikan isu kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kasus Korea Selatan sendiri, fokus pada ekspansi industri berat dan elektronik menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan, sementara partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi tetap terbatas meskipun sektor teknologi berkembang pesat (Kim, 2019).

Selain itu, globalisasi dan liberalisasi ekonomi pada abad ke-21 menantang eksistensi *developmental state* tradisional. Beeson (2003) menjelaskan bahwa tekanan deregulasi internasional dan perjanjian perdagangan bebas membatasi ruang gerak negara untuk melakukan intervensi langsung. Namun, bukannya hilang, peran negara justru beradaptasi. Korea Selatan menggunakan pendekatan *soft intervention*, di mana kebijakan pembangunan dilakukan melalui investasi riset, kebijakan digital, dan perlindungan data nasional—bentuk baru dari proteksionisme yang disamarkan dalam agenda inovasi teknologi (Baldwin & Evenett, 2020). Kebijakan ini memungkinkan negara untuk tetap mengontrol arah pembangunan ekonomi tanpa harus bertentangan langsung dengan aturan perdagangan internasional.

Dalam perkembangan global, muncul pula varian baru dari model ini, yakni *authoritarian developmentalism* atau *state capitalism*, yang ditandai oleh kontrol negara yang kuat atas sektor strategis tanpa perluasan demokratisasi politik (Breslin, 2011). Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia memperlihatkan bahwa peran negara dalam ekonomi tidak berkurang, melainkan berubah bentuk menjadi lebih teknokratis dan strategis. Pola ini turut memengaruhi Korea Selatan, yang sejak 2015 memperkuat kembali peran negara dalam kebijakan industri teknologi dan energi demi menghadapi kompetisi geopolitik, khususnya dalam rantai pasok semikonduktor global.

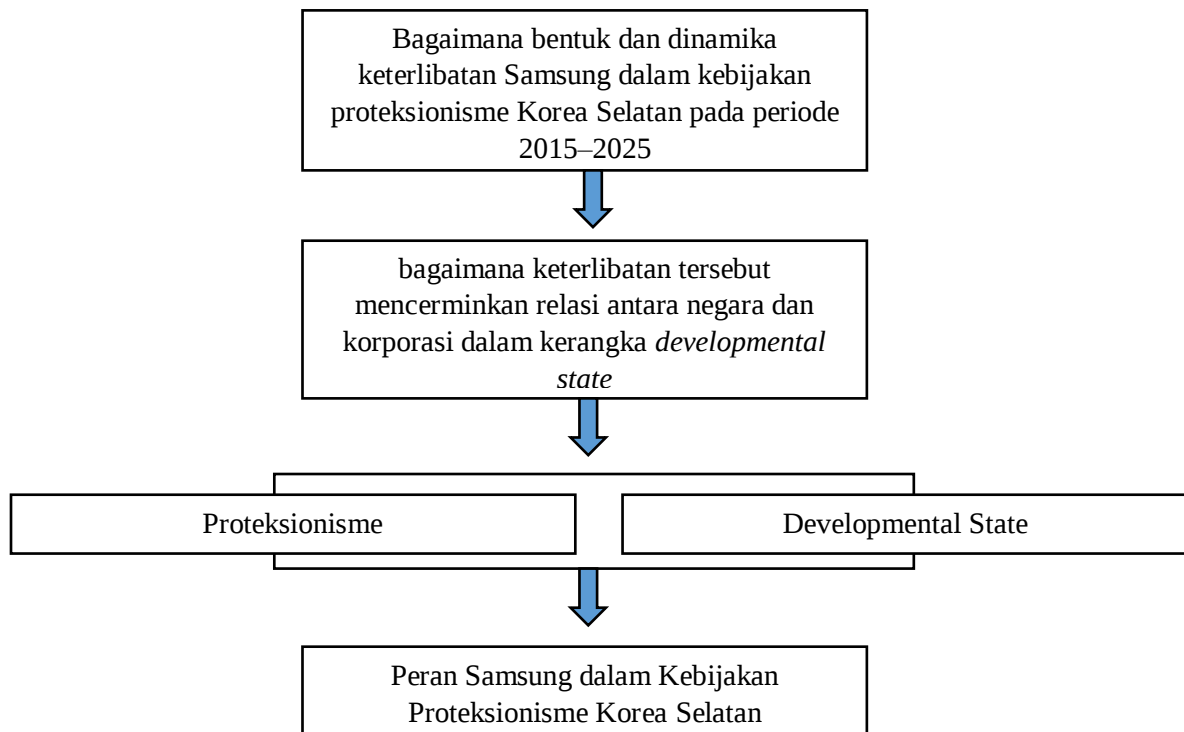
Dalam konteks global Selatan, banyak negara di Afrika dan Amerika Latin kini meninjau kembali model *developmental state* untuk keluar dari ketergantungan struktural terhadap ekonomi global. Bresser-Pereira (Bresser-Pereira, 2019) menegaskan bahwa model ini dapat diadaptasi sesuai kapasitas birokrasi dan sumber daya domestik masing-masing negara, dengan fokus baru pada pembangunan teknologi dan keberlanjutan ekonomi. Namun, keberhasilan model tersebut tetap bergantung pada kemampuan negara dalam membangun birokrasi yang profesional, transparansi tata kelola, serta kemitraan produktif dengan sektor swasta.

Secara keseluruhan, konsep *developmental state* menawarkan kerangka analitis yang kokoh untuk memahami hubungan antara negara, pasar, dan industrialisasi dalam jangka panjang. Dalam konteks Korea Selatan, khususnya periode 2015–2025, konsep ini tetap relevan untuk menjelaskan bagaimana intervensi negara berperan dalam menopang kekuatan industri nasional seperti Samsung. Transformasi dari *developmental state* klasik menuju *innovation developmental state*

menandai upaya Korea Selatan mempertahankan kedaulatan teknologi di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital. Model ini menunjukkan bahwa di era kompetisi global berbasis inovasi, kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi oleh kemampuan negara mengatur arah strategis pembangunan, memperkuat kapasitas industri domestik, dan membangun kemitraan produktif antara negara dan korporasi.

2.3 Desain Penelitian

Desain penelitian divisualisasikan dalam gambar berikut:



Gambar 1 Desain Penelitian
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*literature study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025, serta menganalisis dinamika hubungan antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji pola, narasi, dan dinamika hubungan antara aktor negara dan korporasi dari berbagai sudut pandang akademik, termasuk studi ekonomi politik, kebijakan publik, dan sosiologi ekonomi.

Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara tematik dan interpretatif, dengan tujuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil studi terdahulu secara sistematis. Proses ini mengikuti prinsip analisis kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Henrika et al. (2019), yaitu dengan mengidentifikasi temuan-temuan kunci, membandingkan argumen, serta mengevaluasi celah penelitian yang belum dijelaskan secara memadai. Dengan demikian, studi literatur tidak hanya digunakan untuk menyusun landasan teori, tetapi juga sebagai sarana analisis untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif.

Alasan pemilihan studi literatur didasarkan pada kemampuannya dalam menjelajahi ruang wacana akademik yang luas serta mengintegrasikan berbagai perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji isu keterlibatan korporasi besar dalam kebijakan negara secara lebih sistematis dan mendalam, tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Dalam konteks ini, studi literatur berfungsi sebagai metode analisis yang digunakan untuk menggali dan menjelaskan keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Riswanda (2025), studi literatur kualitatif efektif dalam mengungkap pengaruh lembaga korporasi terhadap regulasi dan tata kelola kebijakan publik. Dengan menggabungkan hasil-hasil studi empiris, konseptual, dan teoritis, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana kebijakan proteksionisme di Korea Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan negara, tetapi juga melibatkan peran aktor ekonomi swasta seperti Samsung.

Selain itu, studi literatur kualitatif juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan dan ekonomi politik. Pendekatan ini memungkinkan konstruksi pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara negara dan korporasi dalam proses perumusan kebijakan ekonomi. Di samping itu, studi literatur juga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memberikan arah bagi penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis praktik kebijakan ekonomi dalam konteks globalisasi yang kompleks.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada bagaimana kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan, baik dalam bentuk tarif, hambatan non-tarif, insentif fiskal, maupun dukungan terhadap industri strategis, berkaitan dengan posisi dan peran Samsung sebagai salah satu *chaebol* terbesar dalam perekonomian nasional. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bentuk dan dinamika keterlibatan Samsung dalam kebijakan tersebut, yang mencakup peran perusahaan sebagai penerima kebijakan, sebagai pelaku industri yang merespons kebijakan, serta sebagai bagian dari struktur ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat Samsung sebagai objek dari kebijakan proteksionisme, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam dinamika kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini menempatkan analisis keterlibatan Samsung dalam kerangka hubungan antara negara dan korporasi dalam model *developmental state*. Fokus ini digunakan untuk memahami bagaimana relasi antara pemerintah Korea Selatan dan korporasi besar seperti Samsung tercermin dalam kebijakan proteksionisme yang diterapkan pada periode kontemporer. Batasan penelitian ini terletak pada periode waktu 2015–2025 dan pada sektor-sektor strategis yang relevan dengan aktivitas utama Samsung, khususnya industri teknologi dan manufaktur berbasis ekspor. Penelitian ini tidak membahas secara khusus dampak sosial ekonomi secara luas, melainkan memfokuskan analisis pada keterlibatan korporasi dalam kebijakan serta relasi antara negara dan korporasi dalam konteks ekonomi politik.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi literatur (*literature review*) terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan mencakup hasil kajian akademik berupa artikel jurnal, buku, skripsi, dan laporan riset yang membahas perkembangan *chaebol*, khususnya Samsung, dalam konteks kebijakan industri dan proteksionisme di Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan serta laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan industri Korea Selatan pada periode 2015–2025.

Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk menelaah fenomena dalam konteks historis dan struktural, serta mengidentifikasi pola dan dinamika relasi antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state* (S.-H. Kim, 2022; Lim, 2012). Melalui studi literatur, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi celah dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterlibatan korporasi besar dalam kebijakan proteksionisme, khususnya yang berfokus pada Samsung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yang merupakan bagian integral dari metode studi literatur kualitatif. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan

topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai basis data ilmiah seperti JSTOR, Scopus, ScienceDirect, dan SpringerLink untuk memperoleh artikel jurnal dan publikasi akademik yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengakses laporan resmi dari lembaga internasional serta dokumen kebijakan pemerintah Korea Selatan yang berkaitan dengan kebijakan proteksionisme dan pengembangan industri strategis.

Jenis dokumen yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, laporan riset, serta dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah maupun organisasi internasional. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria inklusi tertentu, yaitu: (1) kesesuaian dengan topik penelitian, khususnya terkait relasi antara negara dan korporasi dalam konteks kebijakan proteksionisme; (2) kredibilitas akademik dan kejelasan metode; (3) relevansi temporal, terutama dalam rentang waktu 2015–2025; serta (4) kontribusi terhadap pemahaman teoritis maupun empiris mengenai topik yang diteliti. Literatur klasik tetap digunakan apabila memiliki pengaruh penting dalam pengembangan teori (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2014). Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan transparan dengan mencatat metadata setiap sumber, seperti judul, penulis, tahun, abstrak, dan kata kunci. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pelacakan serta sintesis data, sekaligus memperkuat validitas studi literatur dan meminimalkan bias dalam proses pemilihan sumber (Snyder, 2019).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah mengenai keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan pada periode 2015–2025. Proses analisis data

mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (1994), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait kebijakan proteksionisme Korea Selatan serta posisi dan keterlibatan Samsung dalam kebijakan tersebut. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan relasi antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state*. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan temuan-temuan dari berbagai literatur sehingga membentuk pola dan hubungan yang dapat menjelaskan keterlibatan Samsung dalam kebijakan proteksionisme. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti membandingkan berbagai temuan dari literatur yang berbeda untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai bagaimana keterlibatan Samsung mencerminkan relasi antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state*.

Analisis juga dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam literatur, sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasikan berbagai temuan ke dalam tema-tema yang relevan, serta mengembangkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Selain itu, proses analisis ini juga mengacu pada prinsip sintesis literatur sebagaimana dijelaskan oleh Boell dan Cecez-Kecmanovic (2014), sehingga memungkinkan identifikasi kesenjangan penelitian dan pengembangan argumentasi yang lebih sistematis. Dengan demikian, analisis data dalam

penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan analitis.

3.6 Indikator Analisis

Dalam penelitian kualitatif, indikator analisis berfungsi sebagai alat konseptual untuk mengarahkan proses interpretasi data agar tetap sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Indikator analisis membantu peneliti dalam mengorganisasikan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur ke dalam kerangka analisis yang terstruktur, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam konteks studi literatur, penggunaan indikator analisis menjadi penting untuk menghindari interpretasi yang bersifat deskriptif semata, serta mendorong analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap fenomena yang dikaji (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2014; Snyder, 2019).

Indikator analisis dalam penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teori *developmental state*, khususnya konsep *embedded autonomy* yang dikemukakan oleh Evans (1995) serta peran negara dalam kebijakan industri sebagaimana dijelaskan oleh Johnson (1982). Dalam kerangka ini, negara dipahami sebagai aktor yang memiliki kapasitas institusional untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, sekaligus menjalin hubungan yang terstruktur dengan sektor swasta dalam proses industrialisasi (Evans, 1995; Johnson, 1982). Oleh karena itu, indikator analisis dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap hubungan antara negara dan korporasi, khususnya dalam konteks kebijakan proteksionisme di Korea Selatan.

Berdasarkan kerangka tersebut, indikator analisis dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu: **(1) posisi Samsung dalam kebijakan proteksionisme, (2) bentuk keterlibatan Samsung dalam kebijakan, dan**

(3) pola relasi antara negara dan korporasi dalam kerangka *developmental state*.

1. Posisi Samsung dalam Kebijakan Proteksionisme

Dimensi pertama bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Samsung ditempatkan dalam kebijakan proteksionisme Korea Selatan, khususnya dalam sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas negara. Dalam model *developmental state*, negara secara aktif menentukan sektor industri yang dianggap penting dan memberikan dukungan kebijakan untuk memperkuat daya saing nasional (Chang, 2002). Adapun indikator pada dimensi ini meliputi:

- **Sebagai penerima manfaat kebijakan**, seperti subsidi, insentif fiskal, dan perlindungan terhadap industri domestik
- **Sebagai aktor dalam sektor prioritas negara**, khususnya industri teknologi tinggi dan manufaktur berbasis ekspor
- **Sebagai bagian dari struktur industri nasional**, termasuk kontribusi dalam ekspor dan rantai pasok global

Melalui indikator ini, penelitian berupaya untuk memahami apakah Samsung hanya berperan sebagai objek kebijakan atau memiliki posisi strategis dalam kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara.

2. Bentuk Keterlibatan Samsung dalam Kebijakan

Dimensi kedua berfokus pada bagaimana Samsung terlibat dalam dinamika kebijakan proteksionisme Korea Selatan. Dalam literatur ekonomi politik, korporasi besar tidak hanya berperan sebagai penerima

kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang merespons dan berinteraksi dengan kebijakan tersebut (Evans, 1995). Indikator dalam dimensi ini meliputi:

- **Respons terhadap kebijakan negara**, seperti strategi adaptasi terhadap regulasi, investasi, dan perubahan kebijakan industri
- **Partisipasi dalam implementasi kebijakan**, terutama dalam pengembangan industri strategis dan inovasi teknologi
- **Interaksi dengan kebijakan negara**, yang tercermin dalam hubungan antara aktivitas bisnis perusahaan dan arah kebijakan industri

Dimensi ini bertujuan untuk melihat keterlibatan Samsung secara empiris dan kontekstual, tanpa secara apriori mengasumsikan adanya dominasi korporasi terhadap negara.

3. Pola Relasi Negara dan Korporasi

Dimensi ketiga bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara negara Korea Selatan dan Samsung dalam kerangka *developmental state*. Konsep *embedded autonomy* menjelaskan bahwa negara yang efektif dalam pembangunan ekonomi adalah negara yang memiliki otonomi dalam merumuskan kebijakan, namun tetap terhubung secara erat dengan sektor swasta (Evans, 1995). Indikator dalam dimensi ini meliputi:

- **Koordinasi antara negara dan korporasi**, khususnya dalam kebijakan industri dan perdagangan
- **Tingkat otonomi negara**, yaitu sejauh mana negara tetap menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan
- **Keterhubungan institusional (embeddedness)** antara negara dan korporasi dalam proses pembangunan ekonomi

Melalui dimensi ini, penelitian berupaya untuk memahami apakah relasi antara negara dan Samsung bersifat dominatif, kooperatif, atau saling bergantung dalam konteks kebijakan proteksionisme.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proteksionisme Korea Selatan terhadap Samsung pada periode 2015–2025 mengalami transformasi dari proteksionisme konvensional menuju proteksionisme berbasis teknologi dan kapasitas industri. Negara tidak lagi menggunakan tarif impor atau pembatasan perdagangan secara langsung, melainkan menerapkan insentif pajak, subsidi R&D, pembangunan infrastruktur semikonduktor, dan penguatan rantai pasok nasional melalui kebijakan seperti K-Semiconductor Strategy. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan tetap menjalankan intervensi strategis terhadap industri domestik meskipun berada dalam keterbatasan aturan WTO.

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan proteksionisme berhasil menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan investasi, inovasi, dan daya saing global Samsung dalam industri semikonduktor. Namun, keberhasilan Samsung tidak hanya ditentukan oleh dukungan negara, tetapi juga oleh strategi korporasi dan dinamika pasar global. Samsung memiliki bargaining power yang besar karena kontribusinya terhadap ekspor nasional dan posisi Korea Selatan dalam rantai nilai global, sehingga hubungan negara dan korporasi bersifat interdependen dan negosiatif.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa Korea Selatan telah bertransformasi dari *classic developmental state* menuju *corporate-influenced developmental state*. Negara tetap memiliki kapasitas intervensi strategis, tetapi arah kebijakan industri juga dipengaruhi oleh korporasi besar seperti Samsung dan struktur ekonomi global. Dengan demikian, keberhasilan industri semikonduktor Korea Selatan merupakan hasil interaksi antara kebijakan negara, kekuatan korporasi, dan dinamika pasar internasional.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dinamika hubungan antara negara dan Samsung dalam kerangka proteksionisme modern, terdapat beberapa saran akademis antara lain: penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif lintas negara guna menguji validitas konsep *corporate-influenced developmental state* dalam konteks yang berbeda, seperti pada negara dengan struktur industri dan kapasitas negara yang tidak sekuat Korea Selatan; Selain itu, perlu dilakukan pendalaman metodologis melalui penggunaan data kuantitatif (misalnya panel data industri atau firm-level data) untuk menguji secara lebih sistematis hubungan kausal antara kebijakan proteksionisme, investasi korporasi, dan kinerja industri. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki kekuatan empiris yang lebih robust dalam pengembangan kajian ekonomi politik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, M. (2000). Economic Development and Dependency. *Journal of Economic Issues*, 34(3), 731–745.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.
- Association, K. S. I. (2024). *Semiconductor Industry Outlook*.
- Baldwin, R., & Evenett, S. (2020). *Revitalising Multilateralism: Pragmatic Ideas for the New WTO*. CEPR Press.
- Beeson, M. (2003). The Rise and Fall (?) of the Developmental State. *Journal of International Affairs*, 56(2), 1–12.
- Bhagwati, J. (1988). *Protectionism*. MIT Press.
- Boell, S., & Cecez-Kecmanovic, D. (2014). A Hermeneutic Approach for Conducting Literature Reviews. *Communications of the Association for Information Systems*, 34, 257–286.
- Brander, J., & Spencer, B. (1985). Export Subsidies and International Market Share Rivalry. *Journal of International Economics*, 18(1), 83–100.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Breslin, S. (2011). *China and the Global Political Economy*. Palgrave Macmillan.
- Bresser-Pereira, L. C. (2019). *Developmental Macroeconomics*. Routledge.
- Chang, H.-J. (2002a). *Globalization, Economic Development and the Role of the State*. Zed Books.
- Chang, H.-J. (2002b). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. Anthem Press.
- Chu, Y.-W. (2016). State and Global Production Networks. *Global Networks*, 16(4), 485–503.
- Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.

- Gartner. (2024). *Semiconductor Industry Analysis*.
- Gjoni, E. (2022). The Impact of Chaebol on the South Korean Economy. *Economic Change and Restructuring*, 55(4), 1987–2008.
- Henrika, S., Larsson, P., & Lundberg, K. (2019). Conducting Thematic Literature Reviews in Social Science Research. *Qualitative Research Journal*, 19(3), 312–325.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Jwa, S.-H., & Lee, I. K. (2000). The Chaebol and Corporate Governance in Korea. *Journal of Asian Economics*, 11(2), 207–223.
- Kang, D., & Jo, H. (2021). State–Business Relations in Green Industrial Policy. *Energy Policy*, 156, 112389.
- Kim, E. M. (1997). Big Business and Strong State in South Korea. *Asian Perspective*, 21(1), 5–35.
- Kim, L. (2019a). Catch-Up Industrialization and Technological Capability in Korea. *Asian Economic Papers*, 18(2), 34–58.
- Kim, L. (2019b). Technological Learning and Industrial Upgrading in Korea. *Asian Economic Papers*, 18(2), 34–58.
- Kim, S.-H. (2022). Chaebol Dominance and Economic Inequality in South Korea. *Asian Economic Journal*, 36(1), 87–104.
- Lee, C. (1992). *Industrial Policy and Economic Development in Korea*. Oxford University Press.
- Lee, K. (2023). Innovation, Industrial Policy, and the Global Competitiveness of Korean Firms. *Research Policy*, 52(1), 104647. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104647>
- Lee, K., & Lee, B.-Y. (2007). Economic Catch-up and Technological Leapfrogging. *Journal of Economic Development*, 32(1), 1–23.
- Leftwich, A. (1995). Bringing Politics Back In: Towards a Model of the Developmental State. *Journal of Development Studies*, 31(3), 400–427.
- Lim, H.-C. (2012). The Chaebol and Industrial Policy in Korea. *Journal of Contemporary Asia*, 42(2), 221–238.
- Lim, H.-C. (2013). Industrial Policy and Chaebol Reform in South Korea. *Asian*

- Economic Policy Review*, 8(2), 270–289.
- Macrotrends. (2024). *Samsung Revenue Data*.
- McGee, R., & Yoon, Y. (1996). *Chaebol Capitalism: The Korean Model*. Praeger.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Ministry of Trade, I. and E. (2022). *K-Semiconductor Strategy Report*.
- OECD. (2022a). *OECD Economic Surveys: Korea 2022*. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-kor-2022-en
- OECD. (2022b). *Trade and Export Data Korea*.
- Park, Y.-C. (2011). The Korean Developmental State and Economic Policy. *Journal of Economic Policy Reform*, 14(2), 111–126.
- Reuters. (2026). *Samsung Electronics Fails to Reach Deal with Union; PM Says Strike Must Be Averted*. <https://www.reuters.com/business/world-at-work/samsung-elec-labour-union-fail-reach-pay-deal-strike-looms-2026-05-12/>
- Riswanda, A. (2025). Corporate Influence and Public Policy: A Qualitative Literature Review. *Journal of Public Policy Studies*, 10(1), 44–60.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W. W. Norton & Company.
- Saadah, L. (2017). The Impact of Samsung Scandal in South Korean Corporate Culture. *Asian Journal of Business Ethics*, 6(2), 143–160.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Statista. (2024). *Samsung Revenue Statistics*.
- Toro-Sima, M. (2021). Chaebol Companies as the Backbone of South Korea's Economy. *Journal of Asian Economics*, 75, 101319.
- TrendForce. (2024). *DRAM Market Share Report*.
- Wade, R. (1990). *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*. Princeton University Press.
- Westphal, L. E. (1990). Industrial Policy in an Export-Propelled Economy: Lessons

- from South Korea. *Journal of Economic Perspectives*, 4(3), 41–59.
- WiFiTalents. (2026). *Korean Semiconductor Industry Statistics (2026): Latest Data and Trends*. <https://wifitalents.com/korean-semiconductor-industry-statistics/>
- Woo-Cumings, M. (1999). *The Developmental State*. Cornell University Press.
- Yeung, H. W.-C. (2017). Global Production Networks and Development. *Economic Geography*, 93(1), 1–23.
- Yi, S.-Y., & Jung, D.-H. (2007). *Korean Competition Law, Policy and Economics*. Edward Elgar.
- You, J.-S. (2021). *The Politics of Reform in South Korea: How Globalization and Domestic Politics Shape Economic Reform*. Cambridge University Press.